

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui alasan Indonesia bergabung ke dalam forum sub-regional di wilayah Pasifik Selatan yaitu *Melanesian Spearhead Group* (MSG) dengan mengkaji kebijakan politik luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan presiden Joko Widodo dengan melihat Indonesia sebagai aktor utama yang mengambil keputusan secara rasional. Hal tersebut dilandaskan oleh beberapa argument pokok yang akan penulis jabarkan di bab-bab selanjutnya, serta penulis juga akan membicarakan kedekatan Indonesia dengan negara-negara di Pasifik Selatan.

Pasifik Selatan merupakan sebuah kawasan yang terdiri dari negara-negara kepulauan dengan wilayah teritori yang amat kecil, namun sebagian besar eksistensinya berada dalam suatu kawasan yang relatif "tenang dan stabil". Negara-negara tersebut sangat rentan terhadap intervensi asing akibat kondisi geografis mereka yang sangat strategis untuk melakukan kegiatan dagang dan untuk menaruh pangkalan militer di masa Perang Dunia. Sampai saat ini proses dekolonisasi di kawasan Pasifik Selatan belum selesai secara menyeluruh. Sejak terjadinya proses dekolonisasi, muncul negara-negara kecil baru di kawasan Pasifik yang menjadikan kawasan ini

semakin penting artinya.¹ Terdapat beberapa karakteristik yang menjadikannya negara-negara Pasifik Selatan berbeda dengan kawasan lain. Pertama, negara di kawasan Pasifik Selatan disebut dengan *'microstate'* karena memiliki jumlah populasi yang sedikit, serta areanya yang sempit. Kedua adalah letaknya yang berada di pulau, jauh dengan pusat dunia. Ketiga adalah negara yang berada di kawasan ini merupakan negara berkembang. Karena karakteristik ini, diperlukanlah kerjasama antar kawasan untuk menjaga eksistensinya dalam hubungan internasional.² Kestabilan politik Luar Negeri di wilayah Pasifik Selatan penting bagi Indonesia untuk menunjukkan eksistensi dan konsistensinya di kawasan Pasifik Selatan dalam menangani masalah-masalah regional.

Wilayah Pasifik Selatan merupakan wilayah yang cukup strategis dalam kaitannya dengan politik luar negeri Indonesia. Salah satu kepentingan utama Indonesia dalam menjaga hubungan dengan negara-negara Pasifik Selatan adalah untuk menjaga stabilitas nasional dan regional Pasifik. Asia Pasifik dalam keterkaitannya dengan politik luar negeri Indonesia, merupakan bagian dari lingkaran konsentris. Dibuatnya lingkaran konsentris salah satunya didasari oleh kepentingan antarnegara, sehingga hubungan baik antarnegara pun selalu diupayakan demi kerjasama dan pencapaian kepentingan. Indonesia telah memupuk hubungan yang baik dengan negara-negara ASEAN sejak awal. Selain itu, Indonesia dan negara-negara di Asia Pasifik pun

¹ Adil, Hilman. 1993. *Dinamika Perkembangan Pasifik Selatan Dan Implikasinya Terhadap Indonesia*. Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan KEMASYARAKATAN dan Kebudayaan PDII-LIPI.

² Ogashiwa, Yoko. 2002. "South Pacific Forum: Survival Under External Pressure" in *New Regionalisms in the Global Political Economy*, by Shaun Breslin, Christopher W. Hughes, Nicola Phillips and Ben Rosamond (eds). London: Routledge.

memiliki dinamika tersendiri dalam hubungan antarnegara, seperti hubungannya dengan Australia, Timor Timur, dan Papua Nugini.

Kondisi dan posisi geografis Indonesia yang sangat prospektif di Kawasan Asia Pasifik. Indonesia merupakan negara yang berada diantara dua samudera yaitu samudera Pasifik dan Hindia. Semua jalan penghubung antara kedua samudra melewati Kepulauan Indonesia. Secara geografis 1/3 jalur perdagangan dunia melewati selat Lombok, selat Malaka, dan selat Sunda. Selain itu dari sisi politik Indonesia memiliki peranan penting di Asia Pasifik, mengingat lingkaran konsentris pertama Politik Luar Negeri Indonesia adalah ASEAN. Kontribusi Indonesia di Asia Pasifik adalah sebagai motor penggerak terciptanya stabilitas perdamaian dan keamanan yang tertera dalam pasal 1 UU No. 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Keterlibatan aktif Indonesia di Asia Pasifik dapat dilihat dari terciptanya berbagai forum-forum multilateral seperti *ASEAN Regional Forum (ARF)*, *East Asian Summit (EAS)* dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) lainnya. Strategi Indonesia yang lain untuk berperan dalam pengembangan kawasan Pasifik Selatan adalah melalui bantuan kapasitas.

Kawasan Pasifik Selatan sendiri didiami oleh tiga budaya besar, yaitu Melanesia, Polinesia dan Mikronesia. Pengaruh budaya Melanesia terlihat dalam hubungan antara budaya dan kepemimpinan, konstitusi, dan pemerintahan, dan juga hubungan internasional. Melanesia merupakan gugus kepulauan yang memanjang dari Maluku lalu ke timur sampai Pasifik bagian barat, serta utara dan timur laut Australia. Indonesia memiliki 3 wilayah yang memiliki rumpun Melanesia yaitu wilayah Papua, Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Dengan adanya

semangat solidaritas etnis yang tinggi dari beberap negara ras Melanesia, kemudian terbentuklah sebuah organisasi antar pemerintah (*intergovernmental organization*) yaitu *Melanesian Spearhead Group* (MSG).

Terlihat menarik mengingat sudah lama ASEAN menjadi prioritas Indonesia dalam hal politik luar negeri, dan saat ini Indonesia mulai masuk secara perlahan di wilayah Pasifik Selatan. Kawasan kepulauan pasifik memiliki peranan penting bagi kedaulatan Indonesia terutama mengenai permasalahan Papua Barat. Rasa solidaritas sebagai sesama bangsa Melanesia membuat gerakan-gerakan yang menginginkan Papua Barat untuk merdeka mendapat sambutan hangat di negara-negara Melanesia. Negara-negara tersebut tergabung kedalam *Melanesian Spearhead Group*. Keberadaan negara-negara tersebut penting bagi Indonesia mengingat kasus kemerdekaan Papua Barat merupakan hal yang sensitif terutama dari dunia internasional karena menyangkut Hak Asasi Manusia.

Hubungan dengan negara-negara pasifik jika tidak dikelola dengan baik di khawatirkan oleh pemerintah Indonesia bahwa akan mengakibatkan mereka berpihak pada gerakan Papua Merdeka. Suara negara pasifik dalam PBB juga cukup didengar, sehingga menyulitkan posisi Indonesia di dunia Internasional. Meskipun pemerintah negara anggota *Melanesian Spearhead Group* mengakui integritas Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia semenjak disahkannya Resolusi PBB No. 2504 pada tanggal 19 November 1969 tentang status Papua yang sah menurut hukum internasional menjadi bagian dari

NKRI,³ namun kenyataannya *Melanesian Spearhead Group* melakukan bentuk-bentuk intervensi terhadap gerakan separatisme di Papua.

Perjuangan kemerdekaan Papua untuk mendapatkan kemerdekaan tidaklah terlepas dari hubungan Indonesia dengan kawasan Pasifik Selatan. Terdapat beberapa negara yang bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Papua. Sejatinya terdapat dua kubu di dalam *Melanesian Spearhead Group* yang pro terhadap gerakan Papua Merdeka dan sebaliknya. Intervensi itu sendiri di suarakan oleh anggota *Melanesian Spearhead Group* yang pro terhadap kemerdekaan Papua. Isu-isu domestik Indonesia di Papua Barat seperti Pepera, Hak Asasi Manusia dan genosida di jadikan sebagai isu internasional yang kemudian menjadi senjata utama untuk menghentikan pergerakan Indonesia di forum *Melanesian Spearhead Group*. Selain itu, banyak dilakukan provokasi melalui media masa yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Dukungan yang kuat kepada kelompok separatis Papua Merdeka ini di dasari oleh adanya persamaan ras dan juga budaya.

Pada KTT *Melanesian Spearhead Group* ke-18 di Fiji, Indonesia diterima dan diberikan status sebagai *observer*. Pada forum ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan mengenai kondisi Papua serta mempersilakan perwakilan *Melanesian Spearhead Group* melakukan kunjungan ke Papua untuk mendengar langsung terkait kebijakan pembangunan ekonomi serta aspek keamanan di Papua dan melihat kondisi di Papua secara langsung.⁴ Hal tersebut dilakukan

³ Bhakti, Ikrar Nusa. 2006. *Merajut Jaring-Jaring Kerja Sama Keamanan Indonesia-Australia: Suatu Upaya Menstabilkan Hubungan Bilateral Kedua Negara*. Jakarta: LIPI

⁴ SBY Kunjungi Fiji Untuk Jelaskan Kondisi Papua.

<http://www.voaindonesia.com/content/sby-kunjungi-fiji-untuk-jelaskan-kondisi-papua/1938483.htm> di akses pada 10 Mei 2016, pukul 20.30 WIB

terkait isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang diduga dilakukan oleh pemerintah Indonesia di Papua. Keterlibatan Indonesia dalam *Melanesian Spearhead Group*, berdampak pada munculnya perlawanan dari gerakan separatis di Papua yang terancam dipersulit untuk memerdekakan Papua. Gerakan separatisme yang tergabung dalam *United Liberation Movement of West Papua* (ULMWP) berkembang di kawasan Pasifik Selatan menggalang dukungan dari negara-negara anggota *Melanesian Spearhead Group* (MSG).

Pada organisasi regional *Melanesian Spearhead Group* ini, ULMWP juga diterima sebagai *observer* sebagai wakil penduduk Indonesia yang tinggal di luar wilayah Indonesia dan bukan sebagai entitas negara tersendiri. ULMWP sendiri merupakan organisasi politik yang sama dengan FLNKS dalam hal sebagai gerakan pro-kemerdekaan dari negara asal. Bergabungnya ULMWP ke dalam *Melanesian Spearhead Group* menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah Indonesia yang saat ini berstatus *associate member*. Dengan demikian, fokus politik luar negeri Indonesia dewasa ini mengindikasikan adanya kesadaran bahwa Indonesia merasa perlu untuk membangun kedekatan dengan negara-negara di kawasan Melanesia terkait usaha gerakan separatisme ini terhadap kemerdekaan Papua.

B. RUMUSAN MASALAH

Berkaitan dengan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

- Mengapa Indonesia memutuskan untuk bergabung ke dalam *Melanesian Spearhead Group* (MSG)?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang akan menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan dan strategi Indonesia bergabung ke dalam *Melanesian Spearhead Group* (MSG).

D. KONTRIBUSI PENELITIAN

1. Kontribusi Akademis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangsi akademis bagi mahasiswa khususnya jurusan Ilmu Hubungan Internasional terkait kerjasama yang dilakukan Indonesia dan *Melanesian Spearhead Group*. Penelitian tesis melakukan pengkajian lebih mendalam tentang studi kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia. Pengembangan ini dilakukan melalui pengkajian terhadap proses pengambilan keputusan Politik Luar Negeri Indonesia terkait hubungan kerjasama dengan *Melanesian Spearhead Group*.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi tentang kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo terkait kerjasama yang dilakukan dengan *Melanesian Spearhead Group*. Penelitian ini berfokus mencari dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan Indonesia dalam Politik Luar Negeri.

E. STUDI PUSTAKA

Studi Pustaka digunakan untuk mendukung penelitian sebagai bahan acuan sekaligus untuk menambah kajian mengenai keterlibatan Indonesia di dalam *Melanesian Spearhead Group*. Beberapa penelitian

yang sebelumnya telah dilakukan dapat dijadikan acuan dengan tujuan mengembangkan pengetahuan yang dihasilkan dalam penelitian ini. Sejauh ini, telah terdapat beberapa publikasi yang membahas mengenai keterlibatan Indonesia sebagai anggota *Melanesian Spearhead Group*. Beberapa studi yang membahas mengenai rasionalitas kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia terpapar dalam uraian berikut.

Menurut Dame Meg Taylor dalam tulisannya "*Pacific Regionalism: Understanding the Pacific's regional architecture*" menguraikan tentang beberapa forum regional di wilayah Pasifik. Salah satunya adalah *Melanesian Spearhead Group* (MSG), terdiri dari Fiji, Papua New Guinea, Solomon Islands, Vanuatu dan New Caledonia, yang telah menjadi pemecah politik yang efektif bagi permasalahan regional. *Melanesian Spearhead Group* telah menerapkan perjanjian perdagangan bebas yang komprehensif bagi barang dan jasa, termasuk peningkatan keterampilan para tenaga kerja dan mencapai tingkat integrasi ekonomi yang belum ditemukan di wilayah pasifik secara menyeluruh. Tahun 2003 *Pacific Plan Review* menemukan bahwa sebagian besar pemimpin mengartikan kemunculan *Melanesian Spearhead Group* lebih bersifat melengkapi dari pada bersaing. *Melanesian Spearhead Group* diartikan sebagai cerminan keistimewaan dari ras Melanesia, Polinesia, dan Micronesia, serta sebagai perwujudan nyata dari *Melanesia Way*. *Melanesian Spearhead Group* menghadapi beberapa tantangan terkait keadaan buruk *West Papua*, di bawah kekuasaan Indonesia, dengan memberikan status sebagai *observer*.

Gregory Poling melalui tulisannya yang berjudul "*The Upside of Melanesian Leaders' West Papua Compromise*" menguraikan tentang perjuangan *Melanesian Spearhead Group* terkait status keanggotaan

West Papua yang masih diperdebatkan. Keinginan Indonesia menjalin hubungan dengan *Melanesian Spearhead Group* terlihat sebagai suatu cara untuk menghentikan aspirasi Papua tergabung dalam forum yang sama. Dengan diberikannya status *observer* kepada *West Papua* menimbulkan kekhawatiran bagi Indonesia jika status tersebut adalah langkah awal bagi *West Papua* untuk menjadi anggota tetap walaupun pemimpin *Melanesian Spearhead Group* menyatakan bahwa *West Papua* hanya akan mewakili masyarakat Papua yang berada di luar wilayah Papua. Indonesia telah mengajukan petisi keras untuk mencegah kelompok separatis Papua diterima sebagai anggota penuh *Melanesian Spearhead Group*.

Ronald May dalam "*The Melanesian Spearhead Group: testing Pacific island solidarity*" menguraikan tentang hubungan kerjasama yang dilakukan antara anggota-anggota wilayah Pasifik yang tergabung ke dalam forum *Melanesian Spearhead Group*. Dikatakan bahwa awal pembentukan *Melanesian Spearhead Group* adalah untuk melakukan kerjasama perekonomian antara negara-negara anggota sehingga dapat membentuk wilayah sub-regional perdagangan bebas di Pasifik, akan tetapi pada kenyataannya *Melanesian Spearhead Group* dibentuk bukan dengan tujuan perekonomian tetapi lebih kepada politik. *Melanesian Spearhead Group* memiliki solidaritas dan tekad yang kuat untuk menyuarakan ras Melanesia di wilayah Pasifik, baik kepada *member countries* maupun *non-member countries*. Selain Perjanjian Perdagangan, sejumlah proyek dan kegiatan yang berlangsung di dalam sekretariat dan di bawah arahan kepemimpinan politik. Beberapa kegiatan ekonomi, termasuk pengembangan skema gerakan keterampilan untuk memfasilitasi migrasi tenaga kerja antar negara anggota.

Solomon Deli dalam “*The influencing factors of Melanesian Spearhead Group’s stand of West Papua Political Freedom*”, menguraikan tentang motif pengaruh Indonesia di dalam *Melanesian Spearhead Group* serta kepentingan dan dukungan *Melanesian Spearhead Group* untuk kebebasan politik Papua Barat. Dengan diberikannya bantuan finansial dan teknis secara langsung yang selama ini menjadi incaran anggota-anggota *Melanesian Spearhead Group*, menjadi sambutan hangat bagi Indonesia. Salah satu alasan bagi Kepulauan Solomon, Fiji, dan Papua New Guinea membentuk hubungan lebih dekat dengan Indonesia adalah untuk fokus dan berdiskusi mengenai Papua Barat.

Indonesia melihat hal tersebut sebagai jawaban atas kepentingan bersama dengan memberikan bantuan finansial untuk membungkam dukungan mereka kepada Papua Merdeka. *Melanesian Spearhead Group* memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa selama mengakui aspirasi Vanuatu untuk mendukung kasus Papua Barat, *Melanesian Spearhead Group* juga bisa mencari strategi baru untuk melakukan perdebatan dengan Indonesia tanpa harus mempersulit keadaan. Selama Indonesia mempertahankan pengaruh yang kuat terhadap politik regional, maka kesempatan untuk menerima WPNCL perihal status keanggotaan *Melanesian Spearhead Group* masih belum bisa dipastikan.

Tabel 1.1 *Literature Review*

No	Penelitian	Temuan	Catatan
1	<p>Dame Meg Taylor <i>“Pacific Regiolism: Understanding the Pacific’s regional architecture”</i></p>	<p>Tahun 2003 <i>Pacific Plan Review</i> menemukan bahwa sebagian besar pemimpin mengartikan kemunculan <i>Melanesian Spearhead Group</i> lebih bersifat melengkapi dari pada bersaing.</p>	<p><i>Melanesian Spearhead Group</i> diartikan sebagai cerminan keistimewaan dari ras Melanesia, Polinesia, dan Micronesia, serta sebagai perwujudan nyata dari <i>Melanesia Way</i>.</p>
2	<p>Gregory Poling <i>“The Upside of Melanesian Leaders’ West Papua Compromise”</i></p>	<p>Keinginan Indonesia menjalin hubungan dengan <i>Melanesian Spearhead Group</i> terlihat sebagai suatu cara untuk menghentikan aspirasi kelompok Papua Merdeka yang tergabung dalam forum yang sama.</p>	<p>Indonesia telah mengajukan petisi keras untuk mencegah kelompok separatis Papua diterima sebagai anggota penuh <i>Melanesian Spearhead Group</i>.</p>
3	<p>Ronald May <i>“The Melanesian Spearhead Group: testing Pacific island solidarity”</i></p>	<p>Awal pembentukan <i>Melanesian Spearhead Group</i> adalah untuk kerjasama perekonomian antara negara-negara anggota, akan tetapi kenyataannya <i>Melanesian Spearhead Group</i></p>	<p><i>Melanesian Spearhead Group</i> memiliki solidaritas dan tekad yang kuat untuk menyuarakan ras Melanesia di wilayah Pasifik, baik kepada <i>member countries</i> maupun <i>non-member countries</i>.</p>

		lebih kepada tujuan politik.	
4	Solomon Deli “ <i>The influencing factors of Melanesian Spearhead Group’s stand of West Papua Political Freedom</i> ”	Salah satu alasan bagi Kepulauan Solomon, Fiji, dan Papua New Guinea membentuk hubungan lebih dekat dengan Indonesia adalah untuk fokus dan berdiskusi mengenai Papua Barat.	Selama Indonesia mempertahankan pengaruh yang kuat terhadap politik regional, maka kesempatan untuk menerima WPNCL perihal status keanggotaan <i>Melanesian Spearhead Group</i> masih belum bisa dipastikan.

Dari uraian mengenai literatur review diatas, maka peneliti lebih sepakat dengan pendapat dari Gregory Poling mengenai keterlibatan Indonesia di dalam *Melanesian Spearhead Group* terlihat sebagai suatu cara untuk menghentikan aspirasi kelompok Papua Merdeka yang tergabung dalam forum yang sama. Jika dikaitkan dengan penelitian yang peneliti lakukan, maka perbedaannya adalah peneliti akan menganalisis alasan Indonesia terlibat di dalam *Melanesian Spearhead Group* dari sudut pandang yang berbeda dalam beberapa hal. Pertama, tesis ini akan mengkaji kebijakan politik luar negeri Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Sebab, terlihat jelas bahwa wajah Indonesia sangat terarah ke wilayah barat sehingga minim sekali untuk menoleh ke wilayah timur. Hal tersebut akan penulis garis bawahi dengan mengubah pandangan dari barat ke timur menjadi dari timur ke barat, serta menjadikan Pasifik Selatan sebagai halaman depan bagi Indonesia.

Kedua, tesis ini bertujuan menggunakan karakter kebijakan baru Joko Widodo yaitu dalam peningkatan partisipasi di level Internasional/regional. Pembahasan dalam tesis ini bertujuan mendiskusikan hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan dan penerapan kebijakan di masa depan. Dalam hal ini penulis melihat dari sisi Indonesia yang melibatkan diri di dalam forum Pasifik Selatan dengan melihat pertimbangan-pertimbangan kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam masa pemerintahan Joko Widodo. Penelitian ini bertujuan meyoroti keterkaitan antara Indonesia, *Melanesian Spearhead Group*, dan kelompok separatis yang ingin memerdekakan Papua. Peneliti menggunakan Aktor Rasional untuk melihat proses pengambilan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang hingga akhirnya memutuskan untuk bergabung ke dalam forum sub-regional *Melanesian Spearhead Group*. Dalam konteks ini tentunya kebijakan politik luar negeri Indonesia sangat berpengaruh terhadap strategi Indonesia untuk mempertahankan Papua Barat sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

F. KERANGKA PEMIKIRAN

a. Konsep Politik Luar Negeri

Kepentingan nasional merupakan landasan terpenting dalam Politik Luar Negeri suatu negara. Dalam hal ini kepentingan nasional adalah hal vital dalam perumusan kebijakan luar negeri suatu negara. Pada umumnya kepentingan nasional selalu berkaitan dengan keamanan, kesejahteraan, dan kekuasaan.⁵ Politik luar negeri secara umum merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran

⁵ Budiono Kusumohamidjojo. 1987. *Hubungan Internasional: Kerangka Studi Analisis*. Jakarta: Bina Cipta

untuk mempertahankan, mengamankan dan memajukan kepentingan nasional di dalam pencaturan dunia internasional.⁶ Sehingga bisa dikatakan Politik Luar Negeri juga sebagai penentu arah bahkan menentukan posisi suatu negara dalam dalam dunia internasional.

Politik luar negeri merupakan refleksi dari realitas yang terjadi di dalam negeri serta juga dipengaruhi oleh situasi internasional. Hal ini diperkuat oleh Rosenau yang menjelaskan pengkajian kebijakan luar negeri suatu negara akan menghadapi situasi yang kompleks meliputi kebutuhan eksternal dan kehidupan internal.⁷ Berarti kedua kebutuhan tersebut sangat mempengaruhi perumusan kebijakan luar negeri. Adanya faktor internal merupakan tempat pertautan kepentingan nasional, sedangkan eksternal merupakan tempat dimana negara dapat mengartikulasikan kepentingan nasional sehingga kepentingan tersebut dapat tercapai. Politik luar negeri Indonesia memiliki landasan idiil yaitu dasar negara RI yang berpedoman pada Pancasila, sedangkan landasan konstitusional Politik Luar Negeri RI adalah UUD 1945 alinea pertama dan alinea keempat. Sebagai Landasan operasional Politik luar negeri Indonesia adalah prinsip bebas aktif.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja penjelasan corak *bebas* dan *aktif* dari politik luar negeri, sebagai berikut:⁸

“Bebas: dalam pengertian bahwa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila. Aktif: berarti bahwa di dalam menjalankan kebijaksanaan luar negerinya, Indonesia tidak bersikap pasip-reaktip atas kejadian-kejadian internasionalnya, melainkan bersikap aktif”

⁶ Yani, A.A. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya

⁷ *Ibid*

⁸ Mochtar Kusumaatmadja, 1983, *Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaannya Dewasa ini (Kumpulan karangan dan Pidato)*, Bandung: Penerbit Alumni

Sehingga pendapat Rosenau akan kebijakan luar negeri yang diliputi kebutuhan eksternal dan internal dapat tergambar melalui Politik Luar Negeri Indonesia Bebas-Aktif, bahwa untuk merumuskan prinsip tersebut juga diwarnai akan dinamika politik internasional.

Selanjutnya, agar prinsip bebas aktif dapat dioperasionalkan, maka setiap periode pemerintahan menetapkan landasan operasional yang senantiasa berubah disesuaikan dengan kepentingan nasional. Pada masa pemerintahannya Joko Widodo mengungkapkan prinsip “bebas-aktif” dalam politik luar negeri Indonesia, namun landasan operasionalnya adalah menganut pada prinsip Trisakti. Prinsip Trisakti ini merupakan arah Politik Luar Negeri Presiden Soekarno. Makna dari prinsip Triskati yang diterapkan oleh Presiden Joko Widodo di masa pemerintahannya adalah sebagai berikut:⁹

1. Berdaulat di bidang politik, hakikat terpenting dari negara yang berdaulat. kemampuan untuk menjaga kemandirian dan mengaktualisasikan kemerdekaannya dalam seluruh aspek kehidupan bernegara
2. Berdikari di bidang ekonomi, diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan di dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama pembentukan produksi
3. Berkepribadian dalam kebudayaan, diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotong-royongan berdasar pada realitas kebhinekaan dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia masa depan.

⁹ Amaliyah, Nur. 2015. *Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Di Bawah Pemerintahan Presiden Jokowi*, Makassar: Universitas Hasanuddin

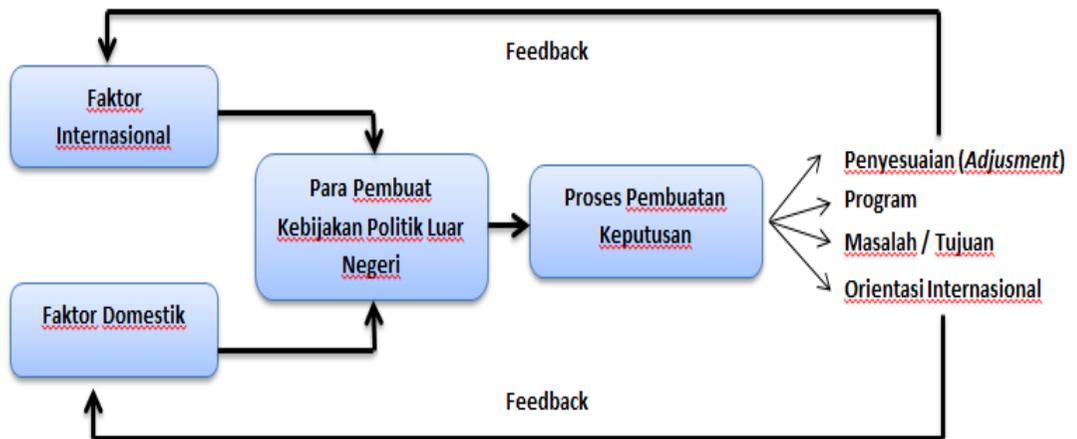
Presiden Joko Widodo dalam menerapkan Politik Luar Negeri Bebas dan Aktif adalah menginterpretasikan makna “Bebas” didasarkan pada kemandirian, dan kedaulatan dari Indonesia dalam menentukan kebijakan dan arah politik itu sendiri.¹⁰ Pemaknaan “Aktif” dalam Politik Luar Negeri Presiden Joko Widodo adalah dimaknai dengan mewujudkan misi yaitu terselip makna *gotong royong* yang dalam hal ini dimaknai dengan menciptakan kemandirian kedaulatan tidak bisa dilakukan sendiri namun dapat merangkul berbagai kekuatan dan terlibat aktif dalam berbagai momentum-momentum kerjasama. Kebijakan pengambilan keputusan Politik Luar Negeri mengacu pada pilihan individu, kelompok, dan koalisi yang mempengaruhi tindakan suatu bangsa di kancah internasional. Keputusan kebijakan Luar Negeri biasanya memiliki resiko yang tinggi dan ketidakpastian yang sangat besar.¹¹

Politik luar negeri adalah seperangkat maksud, tatacara, dan tujuan, yang diformulasikan oleh orang-orang dalam posisi resmi atau otoritatif, yang ditujukan terhadap sejumlah aktor ataupun kondisi di lingkungan luar wilayah kekuasaan suatu negara, yang bertujuan mempengaruhi target tertentu dengan cara yang diinginkan oleh para pembuat keputusan. Agar lebih jelas, berikut adalah skema pembuatan kebijakan luar negeri:

¹⁰ ibid

¹¹ Renshon, J. & Renshon, S. 2008. *The Theory and Practice of Foreign Policy Decision Making, Political Psychology*, Alex Mintz & Karl DeRouden Jr.2010. *Understanding Foreign Policy Decision Making* hal 3

Skema 1.1 Dimodifikasi dari berbagai sumber



Terdapat dua faktor yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan politik luar negeri: faktor internasional dan faktor domestik. Kedua faktor ini digunakan sebagai basis pertimbangan oleh para pembuat kebijakan politik luar negeri, yang melakukan proses pembuatan keputusan. Keputusan yang dihasilkan dapat berupa penyesuaian, program, masalah/tujuan, dan orientasi internasional.

Dalam memaparkan analisa terhadap kebijakan luar negeri, terdapat tiga teori dasar mengenai studi analisis kebijakan luar negeri yakni *realism*, *liberalism*, dan *constructivism*. Realisme melihat setiap kebijakan luar negeri suatu negara didasari pada konsep *groupism*, *egoism* dan *power centrism*. Pada konsep *groupism* yang berarti bahwa negara membutuhkan warga masyarakat satu sama lain guna memenuhi kebutuhan bersama sehingga negara merupakan kumpulan kesatuan warga masyarakat itu sendiri. Kemudian, yang kedua yaitu *Egoism* yang berarti persaingan antar negara akan dikejar oleh masing-masing pihak tanpa mempedulikan pihak lain karena kondisi anarki dan perang merupakan hal yang tidak dapat terelakkan. Dan *power centrism* yang berarti adanya penggunaan kekuatan negara yang krusial kaitannya

denga kepentingan negara.¹² Dalam teori realisme hanya sekelompok negara yang berperan didalamnya yaitu negara yang memiliki power terbesar yang memanfaatkan *power* terkait adanya konflik.

Selain itu, David Singer menggunakan pendekatan berdasarkan tingkatan ruang lingkup dalam analisa yang disebut sebagai *Level of Analysis* (LoA), mengatakan bahwa ruang lingkup dibagi menjadi dua yakni tingkat domestik dan internasional. Tingkatan internasional atau disebut sebagai level sistemik berfokus kepada konsep tingkah laku dan sifat dari aktor negara itu sendiri yang mana dipengaruhi oleh kondisi sistem internasional yang ada pada masa tersebut.¹³ Tingkatan kedua adalah tingkat domestik atau sub-sistem. Tindakan negara ketika dihadapi oleh sebuah fenomena pada domestik dalam negerinya mempengaruhi politik luar negeri negaranya.¹⁴ Nilai historis negara, tradisi agama atau sosial, atau sifat ekonomi dan geografis negara menjadi panduan negara dalam menerapkan dan menciptakan kebijakan luar negerinya. Pada dasarnya *Level of Analysis* mencoba menjelaskan faktor yang dapat mempengaruhi aktor negara dalam bertindak menggunakan kebijakan luar negerinya dalam menghadapi sebuah fenomena berasal dari faktor-faktor yang ada.

Salah satu perspektif dalam ilmu Hubungan Internasional yang mengalami banyak perkembangan adalah Realisme. Perspektif realis banyak membahas tentang perang dan keamanan yang berkaitan dengan militer dan power. Realisme berkembang dan mendasar pada pemikiran bahwa "*man is evil*". Aktor dalam perspektif realisme adalah negara, sebagai satu individual yang tidak akan bekerjasama dengan

¹² Wohlforth, William C., 2012. *Realism and Foreign policy*" dalam Steve Smith, Amelia Hadfield & Tim Dunne, *Foreign Policy, Theories, Actors, Cases*. Oxford

¹³ Singer, J. David, 1961. "*The Level-of-Analysis Problem in International Relations*", *World Politics*, 14(1), the International System: Theoretical Essays

¹⁴ Ibid

aktor lain tanpa ada maksud tertentu (*self-interested*) dan akan selalu berusaha untuk memperkuat dirinya sendiri. Strategi pendekatan yang digunakan oleh aktor negara dinamakan kebijakan luar negeri yang mana menentukan arah interaksi antar aktor.

Sebagai aktor utama, negara berkewajiban mempertahankan kepentingan nasionalnya dalam kancah politik internasional. Negara dalam konteks ini diasumsikan sebagai entitas yang bersifat tunggal dan rasional. Maksudnya adalah dalam tataran negara, perbedaan pandangan politis telah diselesaikan hingga menghasilkan satu suara. Sedangkan negara dianggap rasional karena mampu mengkalkulasikan bagaimana cara mencapai kepentingan agar mendapat hasil maksimal. Seorang realis juga biasanya memusatkan perhatian pada potensi konflik yang ada di antara aktor negara, dalam rangka memperhatikan atau menjaga stabilitas internasional, mengantisipasi kemungkinan kegagalan upaya penjagaan stabilitas, memperhitungkan manfaat dari tindakan paksaan sebagai salah satu cara pemecahan terhadap perselisihan, dan memberikan perlindungan terhadap tindakan pelanggaran wilayah perbatasan. Oleh karena itu, *power* adalah konsep kunci dalam hal ini. Dasar Normatif realisme adalah keamanan nasional dan kelangsungan hidup negara: ini merupakan nilai-nilai yang menggerakkan doktrin kaum realis dan kebijakan luar negeri kaum realis.

Power menurut Morgenthau dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: mengontrol pikiran dan tindakan, kemampuan mendapatkan apa yang diinginkan, dan untuk mendapatkan *power* tidak hanya dilakukan dengan senjata/ancaman, tetapi dengan pengaruh diplomasi dan otoritas. Penulis melihat bahwa kebijakan luar negeri memerlukan alat dalam menganalisisnya melalui teori. Kebijakan luar negeri juga dapat

dibatasi dengan mempersempit analisa yang ada melalui fenomena-fenomena hubungan internasional yang berkembang, yang kemudian dapat menggambarkan perilaku negara dengan menganalisa kebijakan luar negeri yang ada.

Power pada dasarnya berarti kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain untuk melakukan apa yang kita inginkan. Dalam pencapaian ini, dapat dilakukan dengan *hard power* atau *soft power*. *Hard power* lebih bersifat memaksa dan keras, contohnya dengan menggunakan kekuatan militer. *Soft power* bukan berarti tanpa kekuatan, namun *soft power* menggunakan pendekatan yang berbeda. *Soft power* lebih ditujukan pada perubahan cara pandang, ideologi, dan sebagainya. Dalam tesis ini, penulis memilih untuk menggunakan *soft power* untuk melihat pengaruh yang diberikan Indonesia di wilayah Pasifik Selatan, khususnya di dalam *Melanesian Spearhead Group*.

b. Aktor Rasional (*Rational Actor*)

Menurut Graham T. Allison, untuk menganalisis suatu proses kebijakan luar negeri antara lain dapat digunakan *rational policy model*. Proses kebijakan itu sendiri secara teoritik sangat dipengaruhi oleh adanya faktor politik domestik dan eksternal internasional. Allison membuat kajian politik luar negeri yang revolusioner karena dianggap menantang asumsi rasionalisme dalam politik luar negeri yang mengikuti prinsip-prinsip ekonomi dan sedikit banyak dianut juga oleh realisme dalam menjelaskan politik luar negeri suatu negara.¹⁵ Dalam asumsi rasionalisme, tindakan suatu negara dianalisis dengan asumsi bahwa negara mempertimbangkan semua pilihan dan bertindak secara rasional untuk memaksimalkan keuntungan. Politik luar negeri dilihat

¹⁵ Allison, Graham T. 1971. *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*. Boston: Little, Brown and Company. Dalam Hara, A Eby. 2011. *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri: dari Realisme sampai Konstruktivisme*. Bandung: Nuansa.

sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional. Bagi Allison, analisis rasional yang disebut ‘Model Aktor Rasional’ mendasarkan diri pada imajinasi karena tidak mendasarkan analisis pada fakta empirik yang sering di sebut melanggar prinsip hukum *falsifiability*.

Dalam perspektif “*Decision Making Process*”, Graham T Allison dalam bukunya *Essence of Decision: Explaining The Cuban Missile Crisis*, yang diterbitkan Boston: Little, Brown and Company tahun 1971, mengajukan tiga paradigma yang dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan luar negeri negara-negara di dunia, yaitu Model Aktor Rasional (MAR), Model Proses Organisasi (MPO), dan Model Politik Birokratik (MPB), yang akan diuraikan secara singkat berikut ini:

1. Model Aktor Rasional (*Rational Actor*)

Model ini menekankan bahwa suatu proses pengambilan keputusan akan melewati tahapan penentuan tujuan, alternatif/opsi, konsekuensi, dan pilihan keputusan. Model ini menyatakan bahwa keputusan yang dibuat merupakan suatu pilihan rasional yang telah didasarkan pada pertimbangan rasional/intelektual dan kalkulasi untung rugi sehingga diyakini menghasilkan keputusan yang matang, tepat, dan prudent.

2. Model Proses Organisasi (*the Organizational Process*)

Model ini menekankan bahwa suatu proses pengambilan keputusan merupakan suatu proses mekanistik yang melewati tahapan, prosedur, dan mekanisme organisasi dengan prosedur kerja baku (*standard operating procedure*) yang telah berlaku selama ini. Keputusan yang ditetapkan dipandang sebagai output organisasi yang telah mempertimbangkan tujuan, sasaran, dan skala prioritas organisasi.

3. Model Politik Birokratik (*Bureaucratic/Governmental Politics*)

Model ini menekankan bahwa suatu proses pengambilan keputusan dirumuskan oleh berbagai aktor, kelompok, dan pihak yang berkepentingan melalui proses tarik menarik, tawar menawar, saling mempengaruhi dan kompromi antar *stakeholders* terkait. Keputusan yang ditetapkan merupakan proses resultan politik yang melewati deliberasi yang panjang dan kompleks

Setiap negara digambarkan sebagai aktor rasional yang selalu bertindak didasarkan atas kepentingan dirinya sendiri. Dan yang paling mendasar adalah menjaga kedaulatan dan mencapai kepentingan nasional. Dalam model ini digambarkan bahwa para pembuat keputusan melakukan alternatif kebijakan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Asumsi dasar perspektif model aktor rasional yaitu bahwa negara-negara dapat dianggap sebagai aktor yang berupaya untuk memaksimalkan pencapaian tujuan mereka berdasarkan kalkulasi rasional di dalam kancan politik global.¹⁶ Dalam model aktor rasional, negara digambarkan sebagai sebuah aktor individu rasional, memiliki pengetahuan yang sempurna terhadap situasi dan mencoba memaksimalkan nilai dan tujuan berdasarkan situasi yang ada. Berbagai tindakan negara-negara dianalisis dengan asumsi bahwa negara-negara mempertimbangkan semua pilihan dan bertindak rasional untuk memaksimalkan keuntungan. Dalam proses pembuatan kebijakan, pemerintah dihadapkan dengan berbagai pilihan kebijakan dimana masing-masing pilihan kebijakan tersebut memiliki konsekuensi. Negara sebagai aktor rasional akan memilih alternatif

¹⁶ Bruce Russett dan Harvey Starr. 1998. *World Politics: The Menu for Choice*. 2nd ed. New York: W.H. Freeman and Co.

kebijakan yang memiliki konsekuensi paling tinggi (menguntungkan) dalam memenuhi tujuan yang ingin dicapai (*goals and objectives*).¹⁷

Dalam penulisan tesis ini, penulis akan menjabarkan keuntungan dan kerugian mengenai keterlibatan Indonesia di dalam *Melanesian Spearhead Group*. Ada beberapa hal yang penulis liat adalah sebagai keuntungan Indonesia bergabung ke dalam forum sub-regional *Melanesian Spearhead Group*, yaitu: Indonesia merupakan negara dengan jumlah ras Melanesia terbanyak di dibandingkan dengan negara-negara yang terletak di wilayah Pasifik Selatan; secara geografis Indonesia merupakan tertangga dekat dengan negara-negara Melanesia, sehingga sangat mungkin bagi Indonesia untuk menjalin hubungan yang lebih dekat lagi; dan tingkat ekonomi Indonesia dibandingkan dengan negara-negara di Pasifik Selatan sangat jauh di bawah Indonesia, sehingga merupakan salah satu peluang bagi Indonesia untuk memberikan bantuan kepada mereka. Kemudian kerugian timbul dengan bergabungnya Indonesia ke dalam *Melanesian Spearhead Group* adalah munculnya perlawanan dari kelompok separatis Papua Merdeka dengan mengangkat isu-isu yang terjadi di wilayah Papua.

Berdasarkan keuntungan dan kerugian yang telah di jabarkan di atas, penulis melihat lebih banyak keuntungan yang akan di peroleh oleh Indonesia dengan bergabung ke dalam *Melanesian Spearhead Group*. Hal ini lah yang menjadi dasar pertimbangan Indonesia dalam mengambil keputusan untuk bergabung kedalam forum tersebut. Aktor utama yaitu negara harus dapat mengambil keputusan secara rasional dengan menimbang untung dan rugi yang akan di peroleh setelah keputusan di ambil.

¹⁷ Allison, Graham T.1971. *Essence of Decision : Explaining the Cuban Missile Crisis*. Boston: Little, Brown and Company. Dalam Hara, A Eby. 2011. *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri: dari Realisme sampai Konstruktivisme*. Bandung: Nuansa.

Keamanan nasional dan kepentingan nasional merupakan prinsip utama dan tujuan strategis dalam menyusun kebijakan luar negeri. Proses pembuatan kebijakan luar negeri dilakukan oleh aktor yang mana masing-masing berperan sebagai pemain. Hubungan antar aktor secara umum digambarkan dalam proses tarik ulur satu sama lain (*pulling and hauling*). Kebijakan luar negeri dipahami sebagai *political outcomes*. Menurut Allison *outcomes* bukanlah penyelesaian yang dipilih oleh para aktor tetapi merupakan hasil dari kompromi, koalisi dan kompetisi antar aktor.¹⁸

Menganalisa *foreign policy* sebagai bentuk proses rasionalitas atau disebut *foreign policy making as rational process* menurut Allison bahwa *Rational decision making model* terbentuk dari aktor kesatuan (*unitary actor*) yang menjalankan peran sebagai rasional aktor dalam pengambilan sebuah keputusan. Kebijakan luar negeri tersebut menjadi sebuah langkah dalam menangani konflik maupun permasalahan yang dihadapi negara. Seperti dikatakan dalam kaitannya mengenai *Rational Decision-Making Model* adalah bahwasanya sebagai "*foreign policy as results from an intellectual process where the actors choose what is the best for the country and select*". Maka dalam rasionalitas pengambilan kebijakan sebagai tujuan menjalankan kebijakan yang terbaik bagi negara.

Politik Luar Negeri sebagai akibat tindakan-tindakan yang di pilih oleh aktor rasional untuk mencapai target dari tujuan-tujuan yang di tetapkan oleh suatu negara. Pembuatan Keputusan Politik Luar Negeri dari model ini disebut sebagai suatu proses intelektual. Aktor-aktor rasional berusaha untuk membuat kebijakan luar negeri yang dapat memaksimalkan pencapaian kepentingan nasional. Dalam hal ini

¹⁸ Ibid

negara dilihat sebagai entitas monolitik. Allison menekankan bahwa kelemahan dari pandangan tersebut adalah negara satu dengan negara lainnya tidak memiliki sifat yang homogen sehingga aktor-aktor rasional tersebut tidak dapat menjelaskan politik luar negeri maupun mekanisme internal dalam perumusannya dengan baik. Keterkaitan antara model Aktor Rasional dan teori realis dapat dilihat dengan sangat jelas, dimana aktor utamanya adalah negara. Dalam proses pembuatan keputusan, aktor memiliki peran penting untuk mempengaruhi aktor lainnya dalam mencapai tujuan.

G. HIPOTESA

Dengan demikian, Indonesia memutuskan untuk bergabung ke dalam *Melanesian Spearhead Group* karena adanya peningkatan kapasitas diplomasi Indonesia melalui *soft power* sebagai motor penggerak di Kawasan Pasifik Selatan. Sehingga mempermudah Indonesia untuk merubah dukungan negara-negara di kawasan tersebut, khususnya anggota *Melanesian Spearhead Group*, mengenai kedaulatan Indonesia terhadap Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

H. METODOLOGI PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian eksplanatif, yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk menerangkan dan menguji hipotesis dari variabel-variabel penelitian. Penulis menggunakan metode eksplanasi untuk menjelaskan tentang kebijakan Politik Luar Negeri Republik Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang kemudian akan

memperlihatkan alasan Indonesia tergabung ke dalam *Melanesian Spearhead Group*.

2. Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan dua sumber data untuk menyempurnakan analisis, yakni sumber data primer dan data sekunder. Data primer akan didapatkan dengan melakukan observasi lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada aktor-aktor yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian data sekunder akan lebih berfokus pada telaah pustaka yang akan diperoleh dari berbagai buku, dokumen, jurnal, Koran, majalah, *website* dan literature lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka (*library research*) yaitu dengan cara mengumpulkan data dari literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan kemudian menganalisisnya. Literature ini berupa buku-buku, dookumen, jurnal, surat kabar, dan situs-situs internet ataupun laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang dianggap berkompeten yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Oleh karena itu, penellitian ini akan menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang diantaranya berasal dari sumber-sumber berikut, yaitu:

a. Dokumen

Dokumen-dokumen dalam hal ini digunakan untuk menelusuri berbagai dokumen baik itu tertulis maupun dalam bentuk gambar/foto yang berkaitan dengan fokus penelitian, utamanya menyangkut dokumen mengenai pasifik selatan. Disamping itu, teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini menitikberatkan pada catatan-catatan atau arsip-arsip berupa jurnal, buku, laporan tertulis dan dokumen-dokumen berkaitan dengan objek yang diteliti dari instansi terkait.

b. Wawancara

Penentuan informan dilakukan dengan sebuah kriteria yakni dengan mempertimbangkan dan memilih informan yang dipilih dan dipandang mengetahui secara jelas terhadap permasalahan yang akan diteliti dalam hal ini, yaitu sebagai berikut:

1. Djauhari Oratmangun

Staf Khusus Menteri Luar Negeri untuk Isu-Isu Strategis, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

2. Rizal Wirakara

Kepala Direktorat II, Kerja Sama Intra Kawasan Asia-Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

3. Rezha Fernando Wanggai
Pejabat Fungsional Diplomat, Direktorat Kerja Sama
Intra Kawasan Asia-Pasifik dan Afrika, Kementerian
Luar Negeri Republik Indonesia.
4. Mohamad Heri Sarifuddin
Ketua Badan Pengkajian dan Pengembangan
Kebijakan Kawasan Asia-Pasifik dan Afrika,
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
5. Laode Muhammad Fathun, S.IP, M.H.I
Dosen Universitas Pembangunan Nasional Veteran
Jakarta, Bidang Kajian Keamanan Internasional.
6. Adirio Arianto, S.IP, MA
Dosen Universitas Pembangunan Nasional Veteran
Jakarta, Bidang Kajian Keamanan Internasional.

4. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dalam melakukan penelitian ini, dimana permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian dihubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

5. Teknik Pengambilan Kesimpulan

Dalam menganalisis data yang sudah dikumpulkan, penulis akan menggunakan teknik deduksi. Teknik ini dilakukan untuk melihat sebuah fenomena dari prinsip yang bersifat umum ke khusus, kemudian dijelaskan menggunakan teori yang penulis gunakan.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan tesis ini akan dilakukan secara terstruktur dan tersistematis dengan bagian-bagian yang merupakan suatu kesatuan yang utuh dalam memahami, mendeskripsikan, dan menganalisis terhadap permasalahan yang menjadi pokok penelitian. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pada bab pertama akan disampaikan pendahuluan yang mencakup: (a) latar belakang; (b) tujuan penelitian; (c) kontribusi penelitian; (d) rumusan masalah; (e) studi pustaka; (f) kerangka konseptual; (g) hipotesis; (h) metode penelitian; dan (i) sistematika penulisan.

BAB II: Pada bab kedua ini akan dijelaskan mengenai kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia dalam pemerintahan Jowo Widodo terkait landasan politik luar negeri, prinsip, strategi, hingga politik luar negeri Indonesia di wilayah Asia Pasifik dan Pasifik Selatan.

BAB III: Pada bab ketiga akan dijelaskan gambaran umum mengenai *Melanesian Spearhead Group*. Mulai dari terbentuknya *Melanesian Spearhead Group*, tujuan, implementasi dan keperluan *Melanesian Spearhead Group* terhadap Indonesia dan kelompok pendukung Papua Merdeka.

BAB IV: Pada bab keempat dalam tesis ini akan disampaikan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Indonesia melakukan kerja sama dengan *Melanesian Spearhead Group*. Analisis yang dimaksud merupakan elaborasi dari data dan informasi yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya menggunakan kerangka konseptual yang tepat sehingga rumusan masalah dapat terjawab dengan baik.

BAB V: Pada bab terakhir dari tesis ini akan disampaikan kesimpulan yang ditarik dari analisis sebelumnya. Penulis akan

menjawab rumusan masalah yang disampaikan pada bab pendahuluan yaitu mengenai alasan Indonesia bergabung dalam *Melanesian Spearhead Group*.